

GAJI NAKES DI RS DARURAT COVID BABEL BELUM DIBAYAR, OMBUDSMAN BANGKA BELITUNG PANGGIL PIHAK TERKAIT

Jum'at, 30 April 2021 - Umi Salamah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan [Bangka Belitung](#) mengundang Bakuda Babel, Dinkes Babel dan RSUP Babel untuk melakukan pengumpulan informasi terkait permasalahan pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bekerja pada [RS Darurat](#) Covid Babel bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan [Bangka Belitung](#), Jumat, (30/4/2021).

Dipimpin langsung oleh Shulby Yozar Ariadhy selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan [Bangka Belitung](#).

"Kegiatan ini kami maksudkan untuk melakukan pengumpulan informasi awal terkait permasalahan keterlambatan pembayaran gaji selama 4 bulan bagi para tenaga kesehatan dan non kesehatan (53 orang) yang saat ini bekerja di [RS Darurat](#) Covid.

Ombudsman Babel sangat concern terkait polemik keterlambatan pembayaran gaji tersebut karena hal ini juga sudah banyak menjadi perhatian publik," jelas Yozar dalam rilis kepada Bangkapos.com.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan [Bangka Belitung](#) memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri apabila ditemukan beberapa potensi-potensi maladministrasi walaupun tidak adanya laporan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

"Kami punya kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri dan memang potensi maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam pembayaran gaji tersebut. Tentunya kami akan coba dorong agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan oleh instansi terkait, yang paling penting tidak saja jangka pendek tapi bisa permanen sehingga pelaksanaan kewajiban para rekan-rekan kita di RS Covid juga bisa sejalan dengan hak yang diterima," ungkap Yozar.

Sementara, dr Armayani Rusli selaku Direktur RSUP Babel berkomitmen akan segera memberikan penyelesaian terhadap permasalahan pembayaran gaji tersebut (selama 2 bulan) pada awal bulan Mei 2021 nanti menggunakan dana kas BLUD RSUP Babel kemudian untuk sisanya akan diusahakan sesudah lebaran dapat dibayarkan.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan status kepegawaian, masuk di BNPB atau daerah karena hal itu akan menentukan teknis pembayaran honorariumnya.

"Ombudsman akan terus memantau upaya-upaya yang direncanakan tersebut karena kepentingan kami sebagai lembaga pengawas tentu bagaimana bisa terwujudnya kepastian pelayanan, khususnya pembayaran honorarium secara berkelanjutan sesuai masa kerja," kata Yozar.

(Bangkapos.com/Rilis/Cici Nasya Nita)